

## Implementasi Aplikasi RKAS Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Studi kasus SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus Tulungagung)

Gatot Suwarno, Mohammad Naim Musafik

Magister Manajemen Universitas Islam kadiri Jawa Timur, Indonesia

Email: [Gatotsuwarno2022@gmail.com](mailto:Gatotsuwarno2022@gmail.com)

### Abstrak

Dalam mewujudkan program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa. Akan tetapi ada kendala yang dihadapi oleh setiap sekolah seperti kesulitan dalam pembuatan laporan tentang perincian penggunaan dana BOS karena banyaknya data yang harus dimasukkan sehingga mengakibatkan banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk memasukkan data, ketidakakuratan data, maupun kesalahan yang tidak disengaja (*human error*). Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten dimana semua lembaga pendidikannya telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengelolaan dana operasional sekolah yaitu dengan memanfaatkan aplikasi RKAS untuk mengelola laporan dana bantuan operasional sekolah. Jenis penelitian yang penulis ambil adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program plus Kabupaten Tulungagung telah berhasil mengoperasikan dan memanfaatkan inovasi aplikasi MARKAS berdasarkan Surat Edaran nomor: 4313/D/PR/2019 tentang Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan telah menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dimana dalam pengelolaan dana BOS terdapat aktivitas dari perencanaan pengelolaan dana BOS, pelaksanaan pengelolaan dana BOS, dan pengawasan pengelolaan dana BOS.

**Kata kunci:** Implementasi, Aplikasi RKAS, Program BOS

### Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah yang penyelenggaraannya wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah tidak terkecuali pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kewajiban pemerintah akan pelayanan publik ini, sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sejalan dengan salah satu tuntutan dalam reformasi birokrasi publik yakni reformasi di bidang birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi harapan baru masyarakat bagi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn) serta dapat memberikan pelayanan secara tepat, cepat, efektif, efisien, dan konsisten sebagai perwujudan dari birokrasi yang akuntabel. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dari sisi

output, dipergunakan untuk melihat pemberian produk pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai adanya tindakan pemaksaan kepada publik untuk mengeluarkan biaya ekstra pelayanan, seperti suap, sumbangan sukarela, dan berbagai pungutan dalam proses pelayanan yang sedang berlangsung (demante & dwiyanto, 2019).

Terkait peran pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan (*rowing*) berubah kepada visi sebagai pengarah, penggerak, dan fasilitator dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan orientasi dan peran aktif pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik (santosa, 2017). Sehingga bagi warga, reformasi pelayanan publik tentu sangat penting untuk menjadi prioritas mengingat mereka selama ini telah menjadi korban dari praktik pelayanan publik yang buruk (dwiyanto, 2017). Selama ini masyarakat telah dirugikan oleh kualitas pelayanan pemerintah yang buruk mulai dari proses pengurusan perizinan dan segala

macam izin lainnya. Maka dari itu, diperlukan upaya yang berwawasan good governance.

Menurut (syafiie, 2016) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada good governance. Jadi, dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kondisi empiris saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, kkn, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum dapat tercapai (maryam, 2016). Kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan e-government.

Salah satu tujuan implementasi e-government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi (nugraha, 2018). Pemanfaatan e-government bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di indonesia, e-government semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membantu proses penyampaian informasi secara lebih efektif kepada masyarakat (elysia & wihadanto, 2017).

Pemanfaatan e-government telah diamanatkan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo melalui peraturan bupati sidoarjo nomor 46 tahun 2018 tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi menuju smart city di kabupaten sidoarjo. Menurut peraturan bupati tersebut, tujuan ditetapkan tata kelola tik adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah kabupaten sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis android dan website yaitu aplikasi sistem pelayanan rakyat sidoarjo atau yang dikenal dengan sebutan sipraja. Aplikasi

sipraja diresmikan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) sidoarjo pada bulan february 2020 meliputi 18 kecamatan dan desa atau kelurahan yang berjumlah 353 yang salah satunya adalah kelurahan pucanganom. Layanan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat sidoarjo, pasalnya dengan pelayanan sipraja menjamin prosesnya lebih cepat, mudah, murah, dan memuaskan warga. Munculnya aplikasi sipraja dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa pelayanan pemerintah yang berbelit, lambat, mahal, tidak pasti, dan melelahkan (portal.sidoarjokab.go.id, 2019).

Namun dalam implementasinya masih belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan seperti masih minimnya warga yang mengetahui adanya aplikasi sipraja, hal tersebut disebabkan tidak meratanya sosialisasi yang diberikan pihak kelurahan. Selain itu, tidak semua surat dapat diproses misalnya surat perceraian, rumah tangga, serta surat-surat yang di luar aplikasi sehingga harus diproses secara manual.

Berdasarkan penelitian sebelumnya berjudul “efektivitas sistem pelayanan perizinan terpadu (sippadu) pada perizinan siup dinas penanaman modal dan ptsp kabupaten sidoarjo” yang dilakukan oleh (prijono, dkk, 2019). Penelitian tersebut tidak menggunakan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi e-government melainkan menggunakan indikator pendekatan pengukuran efektivitas menurut (prijono, soenarjanto, & radjikan, 2018). Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengembangkan penelitian tentang implementasi e-government agar lebih komprehensif dengan memfokuskan pada pendekatan yang disusun oleh (widodo, 2015), yaitu: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi yang dilakukan oleh kelurahan pucanganom kabupaten sidoarjo. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan kajian teoritis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. PasaI 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada

jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dalam mewujudkan program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Namun di era modern atau digital ini beberapa instansi pemerintah maupun swasta dalam bidang pelayanannya telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat pengelolaan datanya, TIK digunakan dalam seluruh proses kegiatan suatu pemerintahan untuk menerima, menyimpan dan mengirimkan informasi melalui media teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan dan tepat sasaran. Tujuan pemanfaatan TIK dalam pemerintahan adalah agar pelayanan kepada masyarakat dalam lebih efisien. TIK juga dapat memberdayakan masyarakat karena dengan adanya infrastruktur e-government akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses informasi dari pemerintah.

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana pertolongan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan Aplikasi RKAS yang terintegrasi

secara nasional untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan sumber lainnya yang diterima oleh satuan pendidikan.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten dimana semua Lembaga pendidikannya telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengelolaan dana operasional sekolah atau biasa disingkat dengan BOS, dimana dalam pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien serta memudahkan staf pengelola dana bantuan operasional sekolah dalam proses kerjanya. Oleh sebab itu penulis tertarik menganalisis tentang Implementasi Aplikasi RKAS dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan studi kasus SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis sebuah fenomena, peristiwa atau sebuah kejadian, dinamika sosial, sikap kepercayaan, serta persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana Menurut Yusuf (2014), penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan *holistic*; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta dijadikan sebagai secara naratif. Peneliti memilih lokasi SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus Tulungagung sebagai lokasi penelitian, dimana pemilihan tempat ini dipilih berdasarkan pertimbangan adanya fenomena yang ada dan letaknya mudah dijangkau. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini di dapatkan secara langsung dengan cara wawancara, observasi, survey, maupun kuisioner. Sedangkan data sekunder di dapatkan dari berbagai sumber seperti literatur, dokumen, jurnal dan artikel, sedangkan untuk langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

peneliti menggunakan Analisis *Interactive Model* dari Miles dan Huberman yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan perolehan data dan informasi dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang telah dilakukan peneliti diperoleh pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

#### A. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari depan, perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah, harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan itu meliputi : Analisis, kebijakan dan rancangan. Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan pada masa datang dan semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat di wujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat ini. Salah satunya dengan melakukan evaluasi diri. Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja sekolah misalnya, bagian yang mengalami

perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS merupakan sumber utama bagi sekolah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah, dan kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Dalam penyusunan RKAS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah yang di gunakan untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana blockgrant atau lainnya yang bersifat lebih luwes.

#### B. *Organizing* (Pengorganisasian)

*Organizing* atau pengorganisasian adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. *Organizing* juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Fungsi pengorganisasian (*organizing*) dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. Menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang. Tapi semua sumber daya yang dimiliki. Termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya. Tanpa terkecuali. Berdasarkan

hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan bahwa SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus Tulungagung telah menerapkan proses manajemen yaitu tahap pengorganisasian sumber daya manusia.

Pengelolaan suatu organisasi dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya tidak terkecuali dalam pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan sampai pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya di SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus Tulungagung sejauh ini telah melaksanakan tugas mereka dengan baik dan profesional. Operator sekolah adalah seseorang yang menangani aplikasi manajemen RKAS untuk pengelolaan dana BOS, di SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus Tulungagung di jabat oleh Yuni Tri Cahyani S.Pd dan Farid Ahmad Fauzi yang di pilih oleh kepala sekolah masing-masing berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu memiliki komitmen dalam bekerja, menguasai IT, mampu mengoperasikan aplikasi manajemen RKAS, mampu memahami juklak dan juknis dan lain sebagainya.

#### C. *Actuating* (Pelaksanaan)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen aplikasi RKAS dalam pengelolaan program BOS pada SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah program plus Tulungagung diawali dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan penggunaan dana BOS. Pelaksanaan penggunaan manajemen aplikasi RKAS dan penggunaan dana BOS berpedoman pada petunjuk teknis (Juknis) yang di edarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS penggunaan anggaran dalam pembiayaan pendidikan harus berpedoman pada konsep efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi oleh Satuan Pendidikan. Dalam pembiayaan pendidikan terdapat prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1) bahwa: “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”.

Semua kegiatan yang menghasilkan output yang berkualitas tidak terlepas dari ketersediaan biaya yang cukup. Berdasarkan Nomor 6 tahun 2021 Tentang Petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah adalah melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian yaitu MARKAS atau manajemen aplikasi RKAS, dimana aplikasi ini dirancang sebagai aplikasi tunggal serta integrasi sistem pengelolaan anggaran sekolah atau Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sistem pengelolaan daerah selain itu sistem informasi pengadaan sekolah (SIPLah) dan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek juga akan terhubung dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Cara mengunduh dan mengakses ARKAS juga mudah yaitu dengan mengunjungi [rkas.kemdikbud.go.id/download](http://rkas.kemdikbud.go.id/download) Setelah masuk ke situs, sekolah kemudian memilih “Unduhan” dan klik “Unduh”. Setelahnya, sekolah dapat memasang (install) dokumen yang telah diunduh dan melakukan registrasi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan menghubungi dinas pendidikan untuk mendapatkan kode aktivasi. Setelah mendapat kode, sekolah dapat melakukan login dan ARKAS pun sudah bisa di digunakan.

#### D. *Controlling* (Pengawasan).

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan yang baik dapat dilakukan dengan selalu berpedoman kepada pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Johnson (Nasution, 2010) mendefinikan bahwa: “Pengawasan merupakan fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-

penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Informasi yang diperoleh melalui kegiatan pengawasan sangat diperlukan untuk melihat hasil yang telah dicapai. Terry dan Leslie (2013) mengatakan bahwa “Pengawasan anggaran dilakukan untuk mengungkapkan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Melalui ringkasan anggaran dapat dipastikan tanggung jawab untuk pelaksanaan dengan mudah. Penyimpangan-penyimpangan dengan cepat dapat dilihat dan dan dimintakan penjelasan-penjelasan untuk perbedaan-perbedaan yang penting.

Pengawasan penggunaan aplikasi MARKAS untuk pengelolaan dana BOS pada SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah program plus Kabupaten Tulungagung dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Daerah melalui OPD yang menangani urusan Pendidikan yang bertugas melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada Satdik dalam pengelolaan dana BOS melalui ARKAS, kepala sekolah, dan tim BOS sekolah. Pengawasan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pengawasan dituliskan dalam laporan pertanggungjawaban setiap triwulanan. Pelaksanaan pengawasan sudah berjalan sangat baik berdasarkan proses pengawasan yang terdiri dari tahap menentukan standar, pengukuran hasil, melakukan perbandingan, dan pembetulan terhadap penyimpangan sudah dikatakan telah terlaksana dengan baik mengingat program dana BOS telah berjalan semenjak tahun 2006 dan sampai sekarang. Pada tahap penentuan standar sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan oleh kemendikbud.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa di SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program plus Kabupaten Tulungagung telah berhasil mengoperasikan dan memanfaatkan inovasi aplikasi MARKAS berdasarkan Surat Edaran nomor: 4313/D/PR/2019 tentang Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan telah menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dimana dalam pengelolaan dana BOS terdapat aktivitas dari perencanaan pengelolaan dana BOS, pelaksanaan pengelolaan dana BOS, dan pengawasan pengelolaan dana BOS. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program plus Kabupaten Tulungagung melewati beberapa prosedur sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus Tulungagung telah menerapkan teori yang perencanaan/ planning yaitu dengan membuat rkas manual/ merencanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran, tujuan membuat arkas manual untuk meminimalkan kesalahan sebelum entri arkas secara online karena untuk menjalankan aplikasi arkas harus selalu terhubung dengan server pusat (internet). Selain penyusunan RKAS untuk merencanakan kegiatan dalam 1 tahun perencanaan program BOS juga meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

#### 2. Pengorganisasian

SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus Tulungagung sejauh ini telah melaksanakan tugas mereka dengan baik dan professional. Operator sekolah adalah seseorang yang menangani aplikasi manajemen RKAS untuk pengelolaan dana BOS, di SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus Tulungagung di jabat oleh Yuni Tri Cahyani S.Pd dan Farid Ahmad Fauzi yang di pilih oleh kepala sekolah masing-masing berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu memiliki komitmen dalam bekerja, menguasai IT, mampu mengoperasikan aplikasi manajemen RKAS, mampu memahami juklak dan juknis dan lain sebagainya.

#### 3. Pelaksanaan

Pengelolaan BOS pada SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah program plus Tulungagung diawali dengan

melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan penggunaan dana BOS. Pelaksanaan penggunaan manajemen aplikasi RKAS dan penggunaan dana BOS berpedoman pada petunjuk teknis (Juknis) yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS penggunaan anggaran dalam pembiayaan pendidikan harus berpedoman pada konsep efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi oleh Satuan Pendidikan

#### 4. Pengawasan

Pengawasan penggunaan aplikasi MARKAS untuk pengelolaan dana BOS pada SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah program plus Kabupaten Tulungagung dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Daerah melalui OPD yang menangani urusan Pendidikan yang bertugas melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada Satdik dalam pengelolaan dana BOS melalui ARKAS, kepala sekolah, dan tim BOS sekolah. Pengawasan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, maka penulis menyarankan Bagi sekolah Sehubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, perlu kiranya untuk selalu melaksanakan manajemen sekolah yang efektif dan efisien serta transparan. Sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### Referensi

- Amborowati, A., & Marco, R. (2016). PERANCANGAN SISTEM PENGELOLAAN DAN MONITORING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SLTPN YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENGENDALIAN DANA. *Telematika*, 9(2), 11- 36.
- Baridwan, Zaki (2008), *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPPE.
- Crawford, L., Pollack, J., & England, D. (2006). *Uncovering the trends in project management: Journal emphases over the last 10 years*. *International journal of project management*, 24(2), 175-184.
- Duta, Riharjo (2003), *Tinjauan Tujuan Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Pawiatan Surabaya*.
- Fauzan (2001), *Pengaruh Penerapan Good Corporate Gorfenance Terhadap Pelaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*.
- Fitri, A. (2020). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi*. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33-39.
- Harahap (2009), *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Horne dan John M Wachowicz, Jr. 2012. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta.
- Husna dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Rajawali
- Indaswuri Desti Ines (2015). *Analisis dan Rancangan Sistem Informasi pelaporan Bantuan Operasional Sekolah Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (UPT TK dan SD)*.
- James A. Hall. 2009. *System Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julantika et al (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember)*.
- Jumingan, 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kasmir (2008), *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krisnayanti (2015). *Analisis Persepsi Stake Holder Internal dan Eksternal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS Di SMPN I Banjar tahun 2013*.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*.
- Mohammad Nazir, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Munawir (2005), *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta.
- Nugroho, R. W., Widowati, N., &

- Rihandoyo, R. (2013). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011). *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), 171-178.
- Mulyawan, B., HAM, R., Gandul, J. R., & Cinere, D. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 287-303.
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145-159.
- Regina, B. (2015). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 61-66.
- Soemarso (2004), *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Lima, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarni (2015). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smpn 6 Satap Rambah Samo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suliyanto, D. (2020). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMK NEGERI SENDURO KABUPATEN LUMAJANG.
- Tjrtjep Rohendi Rohod. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasari I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153-160.
- Wijaya, R. (2013). Anxiety Uncertainty Management Mahasiswa Inholland Program Studi Manajemen Bisnis Internasional. *Jurnal E-Komunikasi*, 1(1).
- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169-193.
- Yosli, R., Rukun, K., & Giatman, M. (2020). MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (BOS) SEKOLAH DASAR DI KOTA PADANG. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 5(2), 91-106.
- Yusup, M., & Herdi, T. SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (e-BOS) PADA SMK AVICENNA CILEUNGSI.